

BAB III

GAMBARAN BANK UMUM SYARI'AH DI INDONESIA

A. Profil Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia¹

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syari’ah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan syari’ah seperti Asuransi Syari’ah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syari’ah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syari’ah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash

¹ Bank Muamalat, *Sejarah Bank Muamalat Indonesia*, diakses 16 Februari 2019, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syari'ah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syari'ah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syari'ah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara

nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syari'ah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia²

a. Visi

“Menjadi bank syari'ah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syari'ah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

² Bank Muamalat, *Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia*, diakses 16 Februari 2019, <http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>

3. Dewan Pengawas Syari'ah³

Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia)

Warga negara Indonesia, lahir di Tangerang, Banten, 11 Maret 1943. Lulus dari Universitas Ibnu Chaldun dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Merupakan ulama dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 10 April 2007 dan dilantik kembali untuk periode kedua pada 25 Januari 2010 hingga masa kepemimpinan Presiden SBY berakhir. Adapun amanah lain yang pernah disandangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta.
- 2) Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta.
- 3) Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat.
- 4) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009).
- 5) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – 2014).
- 6) Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama 2015-2020.
- 7) Ketua Badang Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syari'ah Nasional 2010-2015.
- 8) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2015-2020.

³ Bank Muamalat, *Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia*, diakses 16 Februari 2019, <http://www.bankmuamalat.co.id/dewan-pengawas-syari'ah>

- 9) Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syari'ah Nasional 2015-2020.
 - 10) Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank Syari'ah Mega Indonesia (aktif).
 - 11) Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BNI Syari'ah (aktif).
 - 12) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) PT BNI Life Insurance.
 - 13) Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera.
 - 14) Anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syari'ah (KPJKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014-sekarang).
- b. Sholahudin Al-Aiyub (Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia)

Warga negara Indonesia, lahir di Pati pada 15 Juli 1974. Meraih gelar Magister Ekonomi dan Keuangan Syari'ah dari Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa dan Bidang Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Sekretaris Bidang Fatwa dan Organisasi DSN-MUI, Katib Syuriah Bidang Bahtsul Masail PBNU, Tenaga Ahli Konsultan Fikih LPPOM-MUI dan sebagai Kontributor Penulis Rubrik Halal dan Keuangan Syari'ah Majalah Ummi. Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 2 Februari 2017.

c. Oni Sahroni (Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia)

Warga negara Indonesia, lahir di Serang pada 26 November 1975. Meraih gelar Doktor bidang Fikih Muqaran dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Saat ini aktif sebagai anggota BPH Dewan Syari'ah Nasional (DSN), anggota ISRA (The International Shariah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia, dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia dan Syari'ah Economic & Banking Institute (SEBI) dan sebagai Direktur Pusat Studi Islam Wasathiyah, Depok. Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapatkan persetujuan OJK dan telah mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 2 Februari 2017.

B. Profil Bank Syari'ah Mandiri

1. Sejarah Bank Syari'ah Mandiri⁴

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut,

⁴ Bank Syari'ah Mandiri, *Sejarah Bank Syari'ah Mandiri*, diakses 16 Februari 2019, <https://www.syari'ahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>

industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syari'ah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syari'ah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syari'ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dengan nama PT Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syari'ah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur

BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syari'ah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri⁵

a. Visi Bank Syari'ah Mandiri

“Bank Syari'ah Terdepan dan Modern”.

b. Misi Bank Syari'ah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

⁵ Bank Syari'ah Mandiri, *Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri*, diakses 16 Februari 2019, <https://www.syari'ahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>

- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syari'ah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri⁶

- a. K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri)

Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943. Beliau merupakan Lulusan S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta tahun 1967. Beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa pada bidang Hukum Ekonomi Syari'ah dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012.

Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BSM, beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPS pada beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah dan Investasi Syari'ah) di Indonesia; Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Periode 2015-2020; Ketua Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sejak Desember 2014 sampai sekarang, serta aktif sebagai pembicara pada forum Ekonomi Syari'ah Nasional dan Internasional.

⁶ Bank Syari'ah Mandiri, *Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri*, diakses 16 Februari 2019, <https://www.syari'ahmandiri.co.id/tentang-kami/dewan-pengawas-syari'ah>

- b. Dr. H. Mohamad Hidayat (Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri)

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Mei 1967. Beliau merupakan lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta tahun 1991, S-2 MBA dari IPWI Jakarta dan S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta tahun 2003. S-3 di bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta Tahun 2014.

Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syari'ah BSM, beliau menjabat sebagai Badan Pengurus Harian Dewan Syari'ah Nasional (BPH DSN) MUI, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia dan Islamic Economic Finance (IEF) Universitas Trisakti. Di samping itu aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/ non keuangan Islam, khotib tetap Istana Presiden dan Wakil Presiden RI, juga sebagai Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation dan penulis buku.

- c. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec (Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Syari'ah Mandiri)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967. Meraih gelar PhD di bidang Micro Finance, dari University of Melbourne Australia tahun 2004. Gelar Master di bidang Ekonomi International Islamic University (IIU) Malaysia tahun 1992. S1 dalam Bidang Syari'ah dan Hukum Islam dari University of Jordan. Beliau menulis 35 buku dalam bidang keuangan, perbankan, leadership dan manajemen.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syari'ah BSM, beliau pernah menjabat sebagai Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syari'ah pada Bank Indonesia, Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Rektor Tazkia University College of Islamic Economics. Beliau juga pernah bertugas sebagai Global Shariah Advisor di Dubai, Komite Ahli Perbankan Syari'ah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia. Pada tahun 2010 diangkat Presiden RI sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional dan pada tahun 2016 diamanahi menjadi Komite Ekonomi dan Industri Nasional.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.